

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS,  
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SUB SEKTOR  
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2018)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KEVIN**

**20160100190**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**  
**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**  
**2020**

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS,  
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SUB SEKTOR  
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

**Oleh :**

**KEVIN**

**20160100190**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2020**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Kevin  
NIM : 20160100190  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia 2015-2018)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

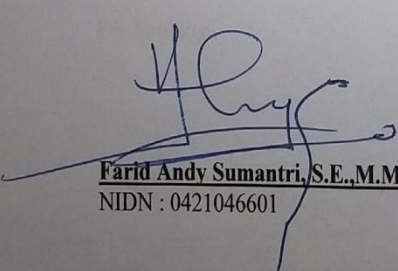
Tangerang, 8 Agustus 2020

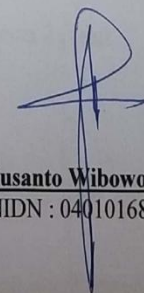
Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,

  
Farid Andy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.  
NIDN : 0421046601

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris,  
Kepemilikan Manajerial, Terhadap Penghindaran Pajak  
(Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Di  
Bursa Efek Indonesia 2015-2018)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Kevin

NIM : 20160100190

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan tim penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu pesyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

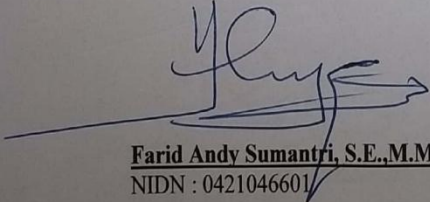
Tangerang, 8 Agustus 2020

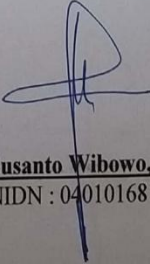
Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,

  
**Farid Andy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.**  
NIDN : 0421046601

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Andy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., AK.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan Bahwa,

Nama Mahasiswa : Kevin

NIM : 20160100190

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris,  
Kepemilikan Manajerial, Terhadap Penghindaran  
Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor  
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia 2015-2018)

Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.

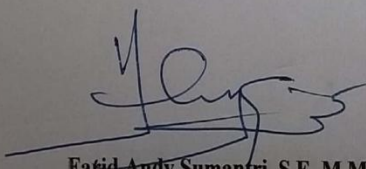
Tangerang, 8 Agustus 2020

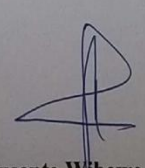
Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,

  
Farid Andy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., AK.  
NIDN : 042104660

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt  
NIDN : 0401016810



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PENGSAHAN**

Nama : Kevin  
NIM : 20160100190  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Sub Sektor Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2015-2018)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **“SANGAT MEMUASKAN”** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, 17 Januari 2020.

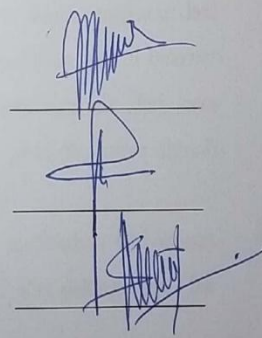
**Nama Penguji :**

**Tanda Tangan :**

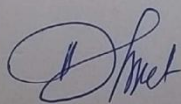
Ketua Penguji : Etty Herijawati, S.E., M.M.  
NIDN : 0416047001

Penguji I : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

Penguji II : Sutandi, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0424067806



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggreani, S.E., M.Si.  
NIDN : 0427047303

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**  
**TANGERANG**  
**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh.

NIM : 20160100190  
Nama : Kevin  
Jenjang Studi : Strata 1  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Sub Sektor Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2015-2018)”**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 3 Febuari 2020

Penulis



Kevin



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Progam Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 19 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Kevin

NIM : 20160100190

# **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

## **(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SUB SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2018)**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Proksi yang digunakan ukuran perusahaan adalah *logaritma natura*; Dewan Komisaris Independen; Kepemilikan Manajerial, sedangkan pengukuran penghindaran pajak menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).

Sampel penelitian yang digunakan di penelitian ini berjumlah 9 perusahaan sektor industri makanan dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) for windows versi 24.

Hasil penelitian menunjukkan proporsi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikan nya sebesar  $0,044 < 0,050$ . Hasil penelitian menunjukkan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan signifikan nya sebesar  $0,050 > 0,159$ . Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan signifikan nya sebesar  $0,031 < 0,050$ .

**Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial**

***Influence Of Company Size, Board Of Commissioners, Managerial  
Ownership Of Tax Avoidance***  
***(An Empirical Study Of Manufacturing Sub Sector Companies On The  
Indonesia Stock Exchange 2015-2018)***

***Abstrac***

*The purpose of this study was to examine the effect of company size, board of commissioner, managerial ownership of tax avoidance on manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2015-2018. The Proxy used by company size is the natural logarithm; independent board of commissioners; managerial ownership, while using tax avoidance measurement use cash effective tax rate (CETR).*

*The research sample used in this study amounted to 9 companies in the food and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2015-2018. This type of research is quantitative research using purposive sampling method. The analysis technique used is multiple linear regresion with assistive devices Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows version 24.*

*The result showed the proportion of company size affects tax avoidance with a significant value of  $(0,044 < 0,050)$ . The result showed that the proportion on the board of commissioners had no significant effect on tax avoidance with value  $(0,050 > 0,159)$ . The result showed the proportion of managerial ownership has a significant effect on tax avoidance with a significant value  $(0,031 < 0,050)$ .*

*Keyword : Company Size, Board Of Commissioners, Managerial Ownership*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan Karunia -  
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ukuran  
Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Terhadap  
Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Manufaktur di  
Bursa Efek Indonesia 2015 - 2018)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu  
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Buddhi Dharma.



Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., AK., CA., C.M.A., C.B.V., Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang ;
2. Ibu Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang Akuntansi (S1) ;
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Ak., Selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma Tangerang ;
4. Bapak Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak., Selaku Dosen Pembimbing yang atas ketulusan dan kesabarannya membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang telah memberika bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang mendukung penulis dan senantiasa memberikan doa, semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman - teman seperjuangan yang saling memberikan dukungan dan pengetahuan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini, khususnya Kevin Crayon, Guspriandy, dll.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik serta saran yang

membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 19 Desember 2019

Penulis

Kevin

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**JUDUL LUAR**

**JUDUL DALAM**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**LEMBAR REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... iii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... xi

**DAFTAR GAMBAR** ..... xii

**BAB I        PENDAHULUAN** ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Identifikasi Masalah ..... 9

C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

**BAB II            LANDASAN TEORI .....** 14

A. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Teori Keperilakuan ( <i>Behavioral Theory</i> ) .....	14
2. Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	15
3. Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evansion</i> ) .....	15
4. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	16
5. Ukuran Perusahaan .....	17
a. Pengertian Ukuran Perusahaan Manufaktur .....	17
b. Indikator Ukuran Perusahaan .....	18
6. <i>Corporate Governance</i> .....	19
a. Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	19
b. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	20
1) Nilai Keadilan ( <i>Fairness</i> ) .....	21



2) Nilai Transparansi ( <i>Transparancy</i> ) .....	21
3) Nilai Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ) .....	23
4) Nilai Tanggung Jawab ( <i>Responsibility</i> ) .....	24
c. Dewan Komisaris .....	25
d. Kepemilikan Manajerial .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Pemikiran .....	35
D. Perumusan Hipotesa .....	37
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak .....	37
2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak .....	38
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak .....	39
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak .....	40

### **BAB III           METODOLOGI PENELITIAN .....**

A. Jenis Penelitian .....	42
---------------------------	----

B. Objek Penelitian .....	43
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Populasi dan Sampel .....	43
E. Teknik dan Pengumpulan Data .....	56
1. Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	56
2. Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	56
a. Ukuran Perusahaan .....	56
b. Dewan Komisaris .....	57
c. Kepemilikan Manajerial .....	57
F. Metode Analisis Data .....	58
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	58
2. Uji Asumsi Klasik .....	58
a. Uji Normalitas .....	59
b. Uji Multikolinieritas .....	59
c. Uji Heteroskedastisitas .....	60
d. Uji Autokorelasi .....	61
3. Uji Statistik .....	62
a. Uji Regresi Linear Berganda .....	62
b. Koefisien Determinasi .....	63
4. Uji Hipotesis .....	64

	a. Uji F .....	64
	b. Uji t .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A.	Deskripsi Objek Penelitian .....	66
1.	Penyajian Data Penelitian .....	68
a.	CETR .....	68
b.	Ukuran Perusahaan .....	69
c.	Dewan Komisaris .....	72
d.	Kepemilikan Manajerial .....	73
2.	Penyajian Data Variabel Penelitian .....	76
B.	Analisis Hasil Penelitian .....	77
1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	77
2.	Uji Asumsi Klasik .....	79
a.	Uji Normalitas .....	79
b.	Uji Multikolinieritas .....	81
c.	Uji Heteroskedastisitas .....	83
d.	Uji Autokorelasi .....	84
3.	Hasil Uji Regresi Berganda .....	84
a.	Uji Regresi Linear Berganda .....	84

C. Pengujian Hipotesa .....	86
1. Hasil Uji Parsial (t) .....	86
a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak .....	87
b. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak .....	87
c. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak .....	88
2. Hasil Uji Simultan (F) .....	88
D. Pembahasan .....	89
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak .....	89
2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak .....	89
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak .....	90
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak .....	90



<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	91
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Keterbatasan .....	92
	C. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL II.1</b> .....	30
<b>TABEL III.1</b> .....	61
<b>TABEL IV.1</b> .....	66
<b>TABEL IV.2</b> .....	67
<b>TABEL IV.3</b> .....	68
<b>TABEL IV.4</b> .....	69

<b>TABEL IV.5</b> .....	71
<b>TABEL IV.6</b> .....	72
<b>TABEL IV.7</b> .....	73
<b>TABEL IV.8</b> .....	75
<b>TABEL IV.9</b> .....	76
<b>TABEL IV.10</b> .....	77
<b>TABEL IV.11</b> .....	80
<b>TABEL IV.12</b> .....	82
<b>TABEL IV.13</b> .....	84
<b>TABEL IV.14</b> .....	85
<b>TABEL IV.15</b> .....	87
<b>TABEL IV.16</b> .....	88

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR I.1</b> .....	5
-------------------------	---

<b>GAMBAR I.2</b> .....	5
<b>GAMBAR I.3</b> .....	5
<b>GAMBAR I.4</b> .....	6
<b>GAMBAR II.1</b> .....	37
<b>GAMBAR IV.1</b> .....	81
<b>GAMBAR IV.2</b> .....	83



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang terbesar, yaitu sekitar 1.148,36 triliun rupiah (76,5 %) dari total pendapatan negara 1.502 triliun rupiah dalam APBN-P 2013 (Depkeu, 2013). Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan rakyat menengah ke bawah, membangun infrastruktur sebagai fasilitas negara, mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta digunakan untuk pembangunan fasilitas di daerah. Begitu sangat banyak peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah segala usaha yang memberikan dampak kepada wajib pajak, baik kegiatan yang diizinkan atau kegiatan khusus yang dapat mengurangi biaya pajak. Pada umumnya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Dyrenge *et al.*, 2008). Mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya tersebut biasanya dilakukan oleh wajib pajak dengan merencanakan strategi pajak disebut *tax planning*. *Tax planning* pada umumnya merujuk pada proses cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang masih berlaku. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini bisa dibilang menjadi masalah yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tapi tidak diharapkan (Maharani & Suardana, 2014) sedangkan menurut Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

Contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah gelombang penghindaran pajak dalam pusaran batu bara. Aliran keuangan gelap industri pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianakemaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka

kondisi ekonomi Indonesia masih tetap sumbu. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Batu bara merupakan sumber energi paling primadona. Saat ini hampir 40 % sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Walaupun tren pemanfaatan energi terbarukan makin tinggi dan bauran energi yang bersumber dari air, angin, cahaya matahari dan panas bumi dengan energi “kotor” yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi, namun batu bara masih akan menjadi pilihan utama dalam memproduksi energi.

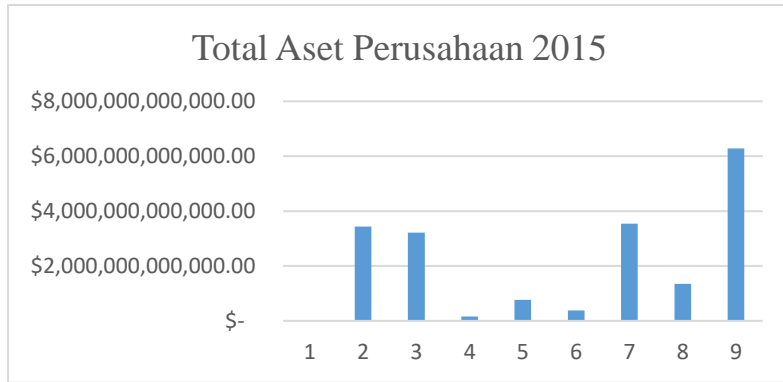
Menurut BP Energy Outlook 2018, batu bara masih akan berkontribusi setidaknya 30 % sebagai sumber energi pembangkit listrik, batu bara juga merupakan bahan untuk berbagai komoditas industri lain. Batu bara digunakan untuk bahan campuran kertas, pupuk, plastik, baja dan keramik. Selain itu, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam.

Ukuran perusahaan adalah ciri khas yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, keputusan investasi dan lain-lain (Surbakti, 2010). Beberapa studi meneliti hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak menggunakan beberapa proksi, misalnya aktivitas *tax shelter*, tarif pajak efektif, *book tax difference* dan lainnya (Hanlon & Heitzman, 2010).

Selain itu ukuran perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan bisa dilihat dari sisi

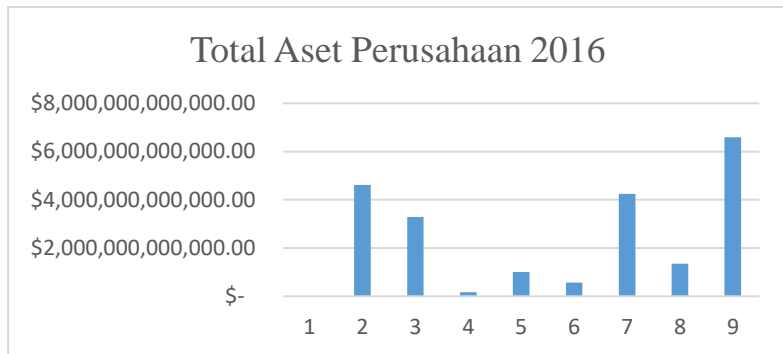
jenis usahanya, bentuk perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan menjadi lebih baik. Jadi dari sisi itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lintas domestik, karena bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di luar negeri, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Penelitian yang dilakukan Surbakti (2012) terkait penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan dan penelitian yang dilakukan Siregar (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

### **Gambar I.1**



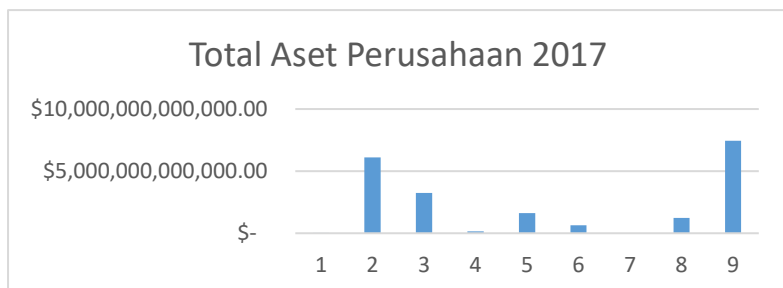
Sumber : Data laporan keuangan

**Gambar I.2**



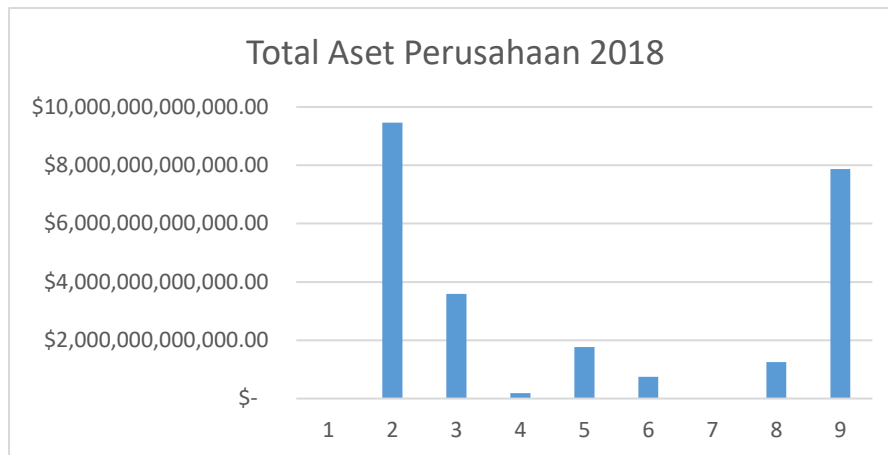
Sumber : Data laporan keuangan

**Gambar I.3**



Sumber : Data laporan keuangan

**Gambar I.4**



Sumber : Data laporan keuangan

*Corporate governance* adalah rangkaian proses, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Menurut Desai & Dharmapala (2007) pertanyaan terkait kegiatan *tax avoidance* adalah apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham. Hal ini memunculkan luasnya penelitian terkait dengan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan pengambilan keputusan keuangan. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga menyatakan bahwa suatu aturan struktur tata kelola perusahaan mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link & Mayer, 2006).

Kenyataannya secara tidak langsung di Indonesia masih banyak perusahaan publik yang menjalankan manajemen dengan kurang baik dalam memuaskan *stakeholders* perusahaan. Sistem *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang baik bagi *stakeholders* dan kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan kepada mereka bahwa bisa memperoleh *return* yang

diharapkan atas dana yang telah diinvestasikan. *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut Addiyah (2014) menyatakan bahwa : *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak melakukan kecurangan, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana / *capital* yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

*Corporate governance* mendorong adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemilik (*principal*) dengan pengendali perusahaan (manajer / *agent*). Jika suatu perusahaan sudah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka diharapkan telah menerapkan prinsip dari *corporate governance* seperti transparansi dan akuntabilitas. Suatu keberhasilan dari adanya penerapan prinsip *corporate governance* adalah mempunyai suatu pengelolaan (*governance*) yang baik, sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *corporate governance*, suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *letter of intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia, *corporate governance* adalah kunci sukses perusahaan untuk berkembang dan maju dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan di bisnis internasional,

terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Menurut Danang (2013) menyatakan bahwa : persaingan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin terjadi kegagalan karena adanya penerapan *corporate governance* dengan sistem regulator yang lemah, standard akuntansi dan audit yang tidak baik, perbankan yang lemah, serta pandangan *board of director* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak - hak pemegang saham minoritas. Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Munculnya berbagai masalah akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan lemahnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Annisa & Kurniasih (2012) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyatakan tidak berpengaruh antara *cooporate governance* (yang diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris) terhadap penghindaran pajak. Sedangkan. Penelitian yang dilakukan Winata (2014) membuktikan pengaruh *cooporate governance* (yang diukur dengan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris) terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut menyatakan berpengaruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Terhadap Penghindaran**



## **Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia 2015-2018).”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dengan adanya perbedaan antara jenis usaha, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.
2. Semakin baik penerapan dewan komisaris akan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak dengan tujuan memperoleh laba perusahaan.
3. Semakin baik penerapan kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak dengan tujuan memperoleh pendapatan perusahaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dikemukakan diatas maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

### **2. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris terhadap pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak untuk menambah pengetahuan ilmu akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia serta dapat menambah referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya peneliti berharap hasil dari penelitian ini membawa peneliti untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi.

2) Bagi Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para mahasiswa sekaligus memperluas wawasan mengenai penghindaran pajak.

### 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan kontribusi sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) BAB yang tercantum di dalam daftar isi dengan tujuan memberikan gambaran singkat dari pada skripsi yang akan dibuat oleh peneliti.

Maka peneliti akan mengemukakan pokok pembahasan dari masing - masing bab sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II      LANDASAN TEORI**

Berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan variabel dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Keperilakuan (*Behavioral Theory*)**

Teori keperilakuan dibentuk dari beberapa ide / konsep yang terutama dari penelitian di bidang ilmu keperilakuan (*behavioral science*). Dalam penelitian tentang ilmu keperilakuan terdapat dua kriteria, yang pertama adalah berhubungan dengan sifat dan perilaku manusia, dan yang kedua adalah terjadi dilakukan secara ilmiah (*scientific manner*). Jadi konsep akuntansi keperilakuan terbentuk dari hasil penelitian ilmiah yang sudah diteliti yang berkaitan secara langsung dengan perilaku manusia.

Menurut Mory (2015) dalam penelitian ini mengarahkan pada hubungan antara manusia (perusahaan / fiskus) dengan sistem akuntansi (*tax avoidance*). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan, pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perihal perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan. Pelayanan yang baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh negara kepada

masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan membangun negara melalui pembayaran pajak.

## **2. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)**

Penerimaan dari sisi pajak adalah hal utama bagi penerimaan APBN sehingga wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban dan kejujurannya dalam membayar pajaknya dalam sistem *self assesment system* yang ditetapkan dalam perpajakan Indonesia.

Menurut Darmawan & Surakartha (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya memperkecil jumlah beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak mengharapkan hal tersebut.

## **3. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)**

Menurut Erly Suandy (2014 : 21), menjelaskan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu akan menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

## **4. Perencanaan Pajak (*tax planning*)**

Menurut Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang semaksimal mungkin.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, menurut Priantara (2013) ada beberapa unsur yang terdapat di dalam pajak seperti :

1. Iuran atau pungutan.
2. Pajak dipungut berdasarkan sesuai undang - undang.
3. Pajak dapat bersifat dipaksakan.
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi.
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Perencanaan pajak menurut Suandy (2014), adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tingkat penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi biaya pajak serendah mungkin atau tidak ada hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Dyreng *et. al.* (2010) variabel ini dihitung melalui CETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin kecil nilai CETR berarti peluang penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan



begitu sebaliknya, jika semakin besar nilai CETR berarti peluang penghindaran pajak perusahaan semakin kecil.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber : Mulyani, Wijayanti dan Masitoh : 2018

## 5. Ukuran Perusahaan

### a. Pengertian Ukuran Perusahaan Manufaktur

Ukuran perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai jual. Dengan kata lain, kegiatan utama dari perusahaan manufaktur adalah mengelola dan mengolah bahan mentah menjadi suatu barang jadi yang memiliki nilai jual dan dipasarkan dalam skala besar kepada konsumen. Pada dasarnya kegiatan perusahaan ini merupakan proses produksi dengan memperhatikan Standard Operasional Prosedur (SOP) tertentu sebagai pola acuan dalam bekerja. Umumnya, jenis perusahaan ini melakukan kegiatan produksi dalam skala besar.

Menurut Hery (2017 : 3) dalam buku yang berjudul Kajian Riset Akuntansi, mengatakan bahwa :

“Ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut.”

Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa besarnya atau kecilnya suatu aset dalam perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam menguranginya sekecil mungkin sehingga bisa mendapatkan laba yang maksimal.

## **b. Indikator Ukuran Perusahaan**

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut (Lisa dan Jogi, 2013) :

“Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan

bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.”

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan atau *size* diukur dengan *logaritma natura* total aset karena manfaat ekonomi yang terwujud dari aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut dalam memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas atau setara kas dalam perusahaan. (Sulistyoningsih, 2014)

**“Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)”**

Sumber : Hendrawati, 2016

## **6. Corporate Governance**

### **a. Pengertian Corporate Governance**

*Corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (ILCG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, *corporate governance* dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*. Hamdani (2016).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* di perusahaan pada jaman sekarang ini sangat baik untuk mempengaruhi perusahaan, sehingga dapat menjaga keseimbangan baik dan benar dalam pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari tata cara kelola yang buruk yang mengakibatkan nama perusahaan menjadi buruk, terkena masalah atau menjadi pailit (Dwitridinda, 2012).

#### **b. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Secara normatif, dalam UU PT sudah terdapat norma - norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*corporate governance*), yaitu prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab dan prinsip akuntabilitas. Dengan diterapkannya prinsip - prinsip tersebut secara keseluruhan, maka akan memberikan perlindungan hukum kepada *stakeholders*, walaupun masih terdapat norma yang masih sumir ketentuannya, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih lengkap, misalnya melalui Peraturan Pemerintah atau ketentuan perundang - undangan lainnya.

##### **1) Nilai Keadilan (*Fairness*)**

Berdasarkan ketentuan dalam UU PT sudah terdapat norma-norma yang mengatur nilai keadilan bagi perlindungan hak pemegang saham, sehingga mereka mempunyai persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham pada perseroan yang

berhak dan kewajiban dalam hubungan hukum merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian pasal (pasal 1 angka (1) UU PT). Kedudukan hukum perseroan adalah badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian yang membatasi tanggung jawab sosial dan menciptakan entitas yang sulit dipengaruhi negara. Sedangkan, dalam Pasal 97 ayat (6) menyatakan bahwa :

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.”

## 2) Nilai Transparansi (*Transparency*)

Peranan *stakeholders* dan RUPS, Direksi, Dewan Komisaris dalam pengelolaan suatu perusahaan diperlukan sekali untuk melaksanakan aktivitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan supaya memiliki kinerja yang baik, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Walaupun ketentuan tentang peraturan hukum perusahaan sebagai salah satu instrumen perlindungan terhadap hak *stakeholders*, tanggung jawab sosial, dan transparansi perubahan secara tertulis sudah ada, namun, dalam perlaksanaanya belum efektif.

Penerapan nilai transparansi dalam suatu perseroan di Indonesia dalam rangka mewujudkan *corporate governance* dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan Minimal (Pendekatan Pasif)

Pendekatan minimal adalah suatu perusahaan hanya melakukan transparansi sejauh yang diwajibkan oleh undang - undang saja. Seperti mengumumkannya dalam Berita Negara, Tambahan Berita Negara, ataupun Surat Kabar. Contoh pasal yang memuat pendekatan ini adalah Pasal 44 ayat (2) UU PT, yang menyatakan bahwa :

“Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (yaitu tentang pengurangan modal) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.”

b) Pendekatan Aktif

Pendekatan aktif adalah perusahaan tersebut secara aktif melakukan keterbukaan dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu, dan tepat sasaran terhadap sebanyak mungkin akses kepada pihak pemegang saham maupun stakeholders lainnya. Contoh pasal yang memuat pendekatan aktif adalah Pasal 116 huruf b. UU PT, yang menyatakan bahwa :

“Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan / atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.”

### 3) Nilai Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam rangka keterbukaan informasi di bidang finansial, patut didayagunakan kelebihan sistem *two-tier* dari manajemen perusahaan sebagaimana dianut oleh negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa kontinental, termasuk Indonesia.

Dengan sistem *two-tier* ini, dimaksudkan bahwa manajemen suatu perusahaan dipimpin oleh dua komando, di mana yang satu melakukan operasional perusahaan, dalam hal ini dilakukan oleh direksi, sedangkan komando yang lainnya adalah Dewan Komisaris, yang bertugas untuk mengawasi, termasuk mengawasi bidang keuangan, terhadap direksi. Pasal yang memuat prinsip akuntabilitas ini, yaitu Pasal 108 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.”

### 4) Nilai Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Nilai tanggung jawab di sini, bahwa perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* maupun masyarakat tersebut. Pasal yang memuat nilai tanggung jawab tersebut :

a) Pasal 97 ayat (4) UU PT, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hak Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.”

b) Pasal 114 ayat (4) UU PT, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hak Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.”

c) Pasal 152 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa :

“Likuiditas bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan.”

Nilai-nilai yang terdapat pada *coorporate governance*, khususnya nilai keadilan (*fairness*), nilai transparansi (*transparancy*), nilai akuntabilitas (*accountability*), dan nilai tanggung jawab (*respondbility*) sesungguhnya telah terdapat pada Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perusahaan akan menjadi lebih kuat apabila dikelola dengan menerapkan prinsip - prinsip tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat terwujud.

### c. Dewan Komisaris

Menurut Hamdani (2016), dewan komisaris adalah sebagai bagian perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk



melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris.

Dewan ada dua jenis sistem yaitu, sistem dewan *unitary* dan sistem dewan *two-tier*. Dewan *unitary* terdiri dari baik itu direktur eksekutif (dari dalam perusahaan atau *insider*) maupun direktur non - eksekutif (dari luar perusahaan atau *outsider*), dan membuat keputusan sebagai kelompok yang satu. Sedangkan di Indonesia mengikuti sistem dewan *two-tier*, yaitu memiliki dua dewan yang terpisah, dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen hanya mencakup eksekutif, dan fokus pada masalah operasional dan dikepalai oleh *chief executive*. Dewan pengawas membuat keputusan strategis dan mengawasi dewan manajemen.

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) (dalam Defy Kurnia, 2015) dengan judul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Intervening* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013, pengertian dewan komisaris sebagai berikut :

“Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan

pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan”

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30 %) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008) dalam Rachmitasari (2015).

Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dalam suatu dewan komisaris perusahaan. Independensi dewan komisaris diukur dengan (Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018) :

$$DK = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber : Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018

#### **d. Kepemilikan Manajerial**

Putra (2015) menyatakan struktur kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki manajer perusahaan baik itu dewan direksi maupun komisaris dalam suatu perusahaan di luar saham yang dimiliki oleh para prinsipal, masyarakat, dan institusional.

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik / pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat ketika manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati keuntungan bagian tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan baik.

$$\text{KPM} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Modal saham perusahaan}}$$

Sumber : Mulyani, Wijayanti dan Masitoh : 2018

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran dalam penelitian maka perlu hanya kiranya untuk membahas hasil-hasil penelitian terdahulu

sebagai acuan dalam membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sehingga akan menghasilkan suatu analisa yang sesuai dengan teori. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan para penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Wijayanti, Chomsatu (2016), Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan intesitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisariss independen, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, Raharjo (2016), Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011-2013. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan,

*multinational company*, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian oleh Mulyani, Wijayanti, Masitoh (2018) Pengaruh *Coorporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikmah (2018) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Tabel II.1**

**Penelitian Sebelumnya**

<b>NO</b>	<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu (2016), Pengaruh Karakteristik Perusahaan,	Independen Variabel : Karakteristik Perusahaan, Good Coorporate Governance, Coorporate	- Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.. - <i>Leverage</i> tidak

	<p>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Social Responsibility.</p> <p>Dependen Variabel : Penghindaran Pajak.</p>	<p>berpengaruh terhadap penghindaran pajak..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intesitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> </ul>
2	<p>Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER)</p>	<p>Independen Variabel : Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- Kepemilikan institusional berpengaruh dan signifikan terhadap <i>tax</i></li> </ul>

	<p>dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011 - 2013</p>	<p>Dependen Variabel : Tindakan Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>)</p>	<p><i>avoidance.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- <i>Leverage</i> (DER) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i></li> </ul>
3	<p>Ni Nyoman Kristiana Dewi, I Ketut Jati (2014) Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan</p>	<p>Independen Variabel : Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dimensi Tata Kelola Perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> </ul>

	<p>Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Dependen Variabel : <i>Tax avoidance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Multinational company</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></li> </ul>
4	<p>Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh (2018) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Pertambangan Yang</p>	<p>Independen Variabel : <i>Corporate Governance.</i></p> <p>Dependen Variabel : <i>Tax avoidance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i></li> <li>- Komisaris independen berpengaruh negatif dan</li> </ul>



	<p>Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).</p>		<p>tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>- Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>- Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
5	<p>Hanik Dian Nikmah (2018) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Independen Variabel : Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial</p> <p>Dependen Variabel : Penghindaran Pajak</p>	<p>- Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>- Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>- Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mengambil dari berbagai penelitian sebelumnya sebanyak 5 jurnal penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. Adanya gap hasil yang menyebabkan perbedaan dengan beberapa penelitian, diharapkan hasil uji yang dilakukan oleh penulis bisa memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat disimpulkan dan dapat dijelaskan. Ada juga beberapa persamaan dari cara perhitungan untuk pada variabel independen dengan variabel dependen.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran di penelitian ini berdasarkan gabungan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dari Mulyani, Wijayanti, Masitoh (2018) Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, penelitian terdahulu dari Dewi dan Jati (2014) Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance*, penelitian terdahulu dari Cahyono, Andini, Raharjo (2016), Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), dan penelitian terdahulu dari Wijayanti, Wijayanti, Chomsatu (2017), Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Respondbility* Terhadap Penghindaran Pajak.

Anggitarani (2009) menyatakan salah satu aspek penting dalam corporate governance adalah Dewan Komisaris pengurus perseroan atau *board of directors*

Indonesia menganut *two board system*, artinya komposisi dewan pengurus perseroan terdiri dari fungsi eksekutif yaitu dewan direksi, dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Keefektifan peran pengawasan oleh Dewan Komisaris didukung dengan keberadaan Dewan Komisaris dalam komposisi Dewan Komisarisnya.

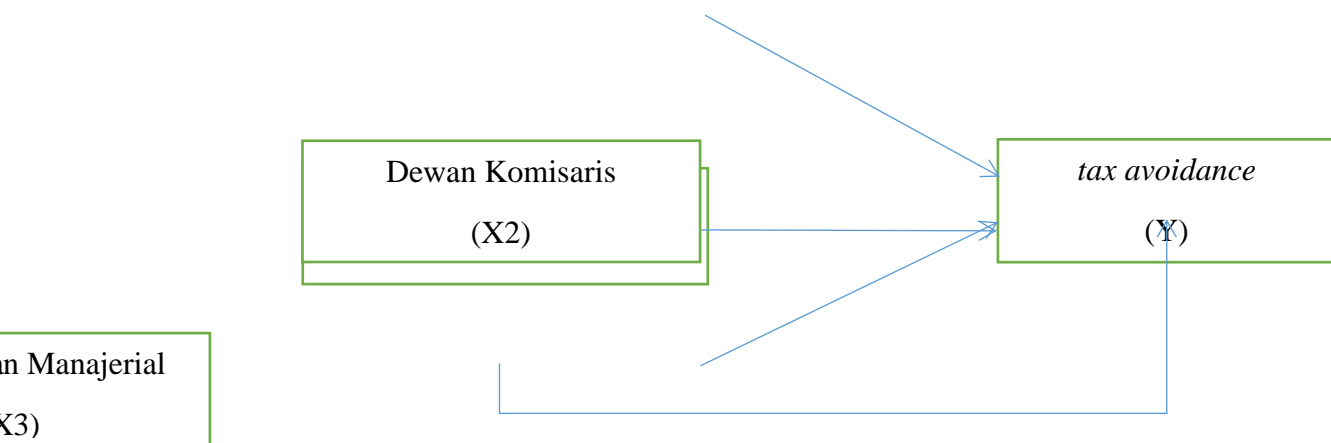
Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan, konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya koreksi dan balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan manajemen (Haruman, 2008). pengawasan yang berjalan efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan, bagian yang terpenting menjadi dasar dari terlaksananya konsep *corporate governance* adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan bagian utama pusat ketahanan dan keberhasilan perusahaan

dikarenakan seorang dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak (Egon, 2000 dalam FCGI, 2004).

**Gambar II.1**

**Kerangka Pemikiran**



**D. Perumusan Hipotesa**

**1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki perusahaan

menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolannya.

Menurut Weston dan Coopeland (dalam Hastalona, 2013) menyatakan mengenai ukuran bahwa suatu perusahaan yang besar dan stabil akan lebih mudah untuk ke pasar modal. Kemudian aksesibilitas ke pasar modal dapat diartikan dengan adanya fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk menciptakan hutang atau memunculkan dana yang lebih besar dengan catatan perusahaan tersebut memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan lain.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Wijayanti, Wijayanti, Chomsatu (2017) membuktikan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut (Hasibuan, 2009 dalam Surbakti, 2012) secara logika, tarif pajak yang besar akan semakin memperbesar jumlah pajak yang dibayar, sehingga akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

**H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

## **2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Alviyani, 2016) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Winata (2014) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian Cahyono, Andini, dan Rahajo (2016) juga menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris yang semakin besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi pajak dan akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan.

## **H2 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut hasil penelitian Nikmah (2018) kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh *tax avoidance*. Hal ini adanya peningkatan jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Akibatnya yaitu kepemilikan saham oleh manajer akan membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya, sehingga manajer tidak menginginkan usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga hal perpajakan tidak mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan.

Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan hasil kinerja dan bertanggung jawab untuk kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Hal tersebut terjadi karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham yang kecil menyebabkan kelangsungan usahanya, sehingga tidak menghendaki usahanya diperiksa terkait masalah perpajakan dan tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Hartadinata, 2013). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut :

**H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

#### **4. Pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak**

Menurut penelitian oleh Wijayanti, Wijayanti dan Chomsatu (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dan dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan adanya pengaruh yang signifikan. Menurut penelitian oleh Nikmah (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian oleh Wiryo dan Ratna (2015) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan adanya pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan *grand theory* yaitu *agency theory* yang memiliki pengertian adanya hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) sehingga jika dikaitkan dengan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* adalah apabila dalam perusahaan memiliki hubungan yang baik antara manajer dengan direksi atau komisaris maka dapat dimungkinkan bahwa manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Hal ini disebabkan kepemilikan saham oleh manajer akan membuat manajer berfokus pada kelangsungan perusahaan, sehingga manajer tidak ingin perusahaan memperoleh kesulitan di masa mendatang. Faktor tersebut mendorong manajer untuk melakukan kewajiban perusahaan, salah satunya pembayaran pajak secara tepat. Berdasarkan hal tersebut maka dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial akan semakin rendah kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

**H4 : Ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian adalah prosedur untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian sehingga membantu penulis dalam membuat penelitian yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2015) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang untuk menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif dan menganalisis fenomena atau kejadian sosial yang terjadi di masyarakat yang saling berhubungan.

Variabel independen yang digunakan di penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X1), dewan komisaris (X2), kepemilikan manajerial (X3) dan variabel dependen adalah penghindaran pajak (Y). Dalam penelitian ini diperlukan adanya hipotesa yang akan diuji sesuai dengan tahapannya yang akan dimulai dari metode analisis data dan rumus statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesa.

## **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang digunakan untuk pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*), ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan menggunakan dewan komisaris dan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang digunakan oleh penulis sebagai tolak ukurnya yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu *www.idx.co.id* pada perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tempat pengambilan data penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria penelitian untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Waktu pengumpulan data dilaksanakan dari Oktober 2019 sampai dengan selesainya penelitian ini.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). Metode *judgment sampling* atau *purposive sampling*. Pengumpulan data didasarkan atas strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (Hamid, 2012).

*Judgment sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki kriteria yang sesuai dalam pengambilan sampel. Perusahaan manufaktur yang dipilih sudah dipertimbangkan agar data yang didapatkan sesuai dengan judul penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Adapun perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

##### **1. GGRM (PT. Gudang Garam, Tbk)**

Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk sekitar 266 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar konsumen yang besar dan beragam dengan persentase perokok dewasa yang signifikan yakni 66% lakilaki dewasa di Indonesia diperkirakan adalah perokok.

Berdasarkan riset pasar Nielsen, pada akhir tahun 2018 Gudang Garam memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sebesar 23,1% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi 33.575 orang di akhir tahun 2018 yang terlibat dalam produksi rokok, pemasaran dan distribusi. Perusahaan juga memiliki 66 kantor area dengan 269 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan termasuk sepeda motor untuk melayani pasar.

Kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama, dari standar keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas kesehatan hingga pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi serta keterampilan teknik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Perusahaan. Gudang Garam secara tidak langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja bagi kurang lebih 4 juta orang yang terdiri dari petani tembakau dan cengkeh, pengecer dan pedagang asongan yang tersebar di seluruh Indonesia. Industri rokok sendiri, termasuk Perseroan, merupakan sumber utama pendapatan cukai bagi negara.

Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Pertama, di Kediri, dengan jumlah penduduk 268 ribu jiwa yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat Perseroan. Fasilitas produksi kedua berlokasi di Gempol, Jawa Timur yang berjarak 50 kilometer dari Surabaya. Dari kedua fasilitas produksi ini Perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada.

## 2. KAEF (PT. Kimia Farma (persero), Tbk)

Berdiri pada 16 Agustus 1971 berdasarkan Akta Pendirian No. 18 yang telah diubah dengan Akta Perubahan No. 18 tanggal 11 Oktober 1971, keduanya dibuat di hadapan Notaris Soelaeman Ardjasmita, di Jakarta. Akta Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971, yang didaftarkan pada buku registrasi No. 2888 dan No. 2889 tanggal 20 Oktober 1971 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 November 1971 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 508.

Kimia Farma adalah perusahaan yang lahir dari kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1817. Kimia Farma pada awalnya adalah “NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co”. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda, pada tahun 1958 Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi “PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma”. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi “PT Kimia Farma (Persero)”.

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan nama perusahaan disesuaikan menjadi “PT Kimia Farma (Persero) Tbk”. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia).

3. KINO (PT. Kino Indonesia, Tbk)

PT. Kino Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 8 Februari 1999 yang bergerak di bidang perindustrian, angkutan, pergudangan, perdagangan, jasa, distribusi. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 8 Februari 1999 oleh Notaris Hadi Winata, SH, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melalui Surat Keputusan No. C-7429HT.01.01-TH.99 tanggal 20 April 1999. Perusahaan ini terdaftar dalam sebagai bagian Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2015.

4. PYFA (PT. Pyridam Farma, Tbk)

PT. Pyridam Farma, Tbk merupakan PT Pyridam Farma Tbk. didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Notaris No. 31 yang dibuat oleh Notaris Tan Tiong Kie dan disahkan oleh Kementrian Kehakiman Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA 5/118/3 tertanggal 17 Maret 1977 dengan nama PT Pyridam. Pengesahan pendirian

PT Pyridam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Suplemen No. 801 tertanggal 23 Desember 1977. Perseroan dibentuk oleh para pendiri dengan tujuan awal utama untuk memproduksi dan memasarkan produk veteriner.

Pada tahun 1985 Perseroan mulai memproduksi produk farmasi dan pada tanggal 1 Februari 1993, PT Pyridam Veteriner didirikan untuk memisahkan kegiatan produksi farmasi dari kegiatan produksi veteriner.

Fasilitas produksi farmasi Perseroan seperti disebutkan diatas yang berupa bangunan pabrik dan peralatannya, dibangun pada tahun 1995 yang terletak di desa Cibodas, Cianjur, Jawa Barat dan mulai dioperasikan pada tahun 2001.

#### 5. SKBM (PT. Sekar Bumi, Tbk)

Sekar Bumi pertama kali didirikan pada bulan April 1973, dan merupakan salah satu pelopor di bidang pengolahan udang beku di Indonesia. Slogan kami “Quality Food, Quality Life”, mewakili komitmen kami untuk menjamin kualitas dalam semua produk yang kami tawarkan.

Dengan teliti kami memilih bahan baku kami dari pemasok terpercaya, dan mengolah produk-produk kami di bawah kontrol kualitas yang ketat di pabrik-pabrik pengolahan kami yang bersertifikasi internasional. Kami sangat yakin bahwa makanan yang berkualitas meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan, dan keyakinan ini tercerminkan dalam cara kami berbisnis.

Sekar Bumi bergerak terutama dalam bidang manufaktur produk makanan beku, yaitu Hasil Laut Beku Bernilai Tambah dan Makanan Olahan Beku. Di bawah lini Produk Hasil Laut Beku Bernilai Tambah, kami menghasilkan terutama udang bernilai tambah, dan ikan, cumi-cumi, serta produk hasil laut lainnya.

6. SKLT (PT. Sekar Laut, Tbk)

PT Sekar Laut Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan dan pembangunan, khususnya dalam industri di sektor manufaktur, untuk sub sektor makanan dan minuman. Produk-produk yang dihasilkan adalah: kerupuk, saos, sambal, bumbu masak dan roti. Perusahaan memulai industri rumah tangga di bidang perdagangan dan produk kelautan sejak tahun 1966, di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian, usaha berkembang menjadi pabrik kerupuk udang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya PT Sekar Laut Tbk.

Dengan kegigihan, usaha yang dirintis berkembang pesat. Para pendiri mampu mengembangkan industri rumah tangga menjadi perusahaan penghasil kerupuk. PT Sekar Laut Tbk, akhirnya resmi didirikan pada 19 Juli 1976 dalam bentuk perseroan terbatas. Proses pembuatan kerupuk telah dikembangkan dengan teknologi modern, yang mengutamakan kualitas dan kebersihan. Produk perusahaan saat ini tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal, namun juga merambah ke pasar ekspor (luar negeri).

Perusahaan berkembang dan memproduksi kerupuk, saos tomat, sambal, bumbu masak, roti dan makanan ringan lainnya. Produk-produk perusahaan dipasarkan dengan merk "FINNA".

Produk Perseroan diproduksi dari bahan alami dan diproses secara higienis, sehingga merupakan makanan sehat, aman dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Perusahaan juga



bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan makanan lainnya untuk menyuplai produk makanan sesuai kebutuhannya masing-masing.

#### 7. ULTJ (PT. Ultra Jaya, Tbk)

Bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960an oleh Bapak Achmad Prawirawidjaja (alm), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (“Perseroan”) dari tahun ke tahun terus berkembang, dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan & minuman di Indonesia.

Pada periode awal pendirian, Perseroan hanya memproduksi produk susu yang pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970an Perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT (Ultra High Temperature) dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik (Aseptic Packaging Material).

Pada tahun 1975 Perseroan mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merk dagang “Ultra Milk”, tahun 1978 memproduksi minuman sari buah UHT dengan merk dagang “Buavita”, dan tahun 1981 memproduksi minuman teh UHT dengan merk dagang “Teh Kotak”. Sampai saat ini Perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam jenis produk minuman UHT dan terus berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan dan selera konsumennya.

Pada tahun 1981 Perseroan menandatangani perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Ltd, USA, untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk keju dengan merk dagang “Kraft”. Pada tahun 1994 kerjasama ini

ditingkatkan dengan mendirikan perusahaan patungan: PT Kraft Ultrajaya Indonesia, yang 30% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Perseroan juga ditunjuk sebagai exclusive distributor untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh PT Kraft Ultrajaya Indonesia. Sejak tahun 2002 - untuk bisa berkonsentrasi dalam memasarkan produk sendiri- Perseroan tidak lagi bertindak sebagai distributor dari PT Kraft Ultrajaya Indonesia.

Pada bulan Juli 1990 Perseroan melakukan penawaran perdana saham-sahamnya kepada masyarakat (Initial Public Offering = IPO). Pada tahun 1994 Perseroan melakukan ekspansi usaha dengan memasuki bidang industri Susu Kental Manis (Sweetened Condensed Milk), dan di tahun 1995 mulai memproduksi susu bubuk (Powder Milk). Sejak tahun 2000 Perseroan melakukan kerjasama produksi (toll packing) dengan PT Sanghiang Perkasa yang menerima lisensi dari Morinaga Milk Industry Co. Ltd., untuk memproduksi dan mengemas produk-produk susu bubuk untuk bayi. Pada tahun 2008 Perseroan telah menjual merk dagang "Buavita" dan "Go-Go" kepada PT Unilever Indonesia, dan mengadakan Perjanjian Produksi (Manufacturing Agreement) untuk memproduksi dan mengemas minuman UHT dengan merk dagang Buavita dan Go-Go.

Perseroan telah 3 kali melakukan penawaran umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right Issue, yaitu pada tahun 1994, tahun 1999, dan tahun 2004. Perseroan juga telah 2 kali melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) yaitu pada tahun 2000 dengan rasio 1: 5, dan tahun 2017 dengan rasio 1:4.

8. WIIM (PT. Wismilak Indah Makmur, Tbk)

Perjalanan historis Wismilak di industri rokok dimulai pada tahun 1962 dengan didirikannya PT Gelora Djaja yang bergerak sebagai produsen rokok kretek premium merek Galan, Wismilak, dan Diplomat. Sejak awal pendirian, Wismilak telah berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman berbeda kepada konsumen melalui diferensiasi produk rokok premium dengan racikan yang khas dan bumbu-bumbu berkualitas. Selanjutnya guna menjaga keberlangsungan usaha, Perseroan melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Gawih Jaya pada 1983 yang berperan sebagai perusahaan distributor produk-produk kretek milik PT Gelora Djaja ke seluruh wilayah Nusantara. Dalam rangka memperluas jangkauan pasar, PT Gawih Jaya bertanggung jawab dalam mendirikan kantorkantor area yang berfungsi untuk menysasar toko-toko grosir, retailer dan para pedagang kretek lainnya.

Metode pemasaran yang efektif menghasilkan sambutan luar biasa yang datang dari konsumen. Hal tersebut membuat kedua manajemen dari masing-masing perusahaan akhirnya memutuskan melakukan joint operation dalam rangka memperkuat fondasi usaha guna menghadapi tantangan industri rokok nasional yang semakin masif. Oleh karenanya dengan fondasi dan bekal yang matang, Perseroan resmi mendirikan PT Wismilak Inti Makmur pada 14 Desember 1994 dengan tujuan sebagai perusahaan induk dari PT Gelora Djaja dan PT Gawih Jaya. Perseroan berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 14 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Bagio Atmadja, SH., Notaris di Sidoarjo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18.481 HT.01.01. Th.94. tanggal 19 Desember 1994, telah didaftarkan

dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 2736/1994 pada tanggal 21 Desember 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 13 Januari 1995, Tambahan Berita Negara No. 339.

Selanjutnya, PT Wismilak Inti Makmur ditetapkan memiliki kegiatan usaha berupa pemasaran dan penjualan produk rokok dan kelengkapannya serta penyertaan pada produsen rokok kretek. Dalam perjalanannya, Wismilak terus beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih hingga akhirnya menghadirkan varian Sigaret Kretek Mesin (SKM) untuk kretek filter dan produk cerutu. Meski begitu, Wismilak tetap menjaga keotentikan produknya yang telah dikenal dekat oleh Konsumen dengan tetap memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan proses pengerjaan dengan peralatan non-mesin.

Sejalan dengan pengembangan internal yang terus dilakukan, Wismilak bertekad untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha dengan melakukan penawaran saham umum perdana di Bursa Efek Indonesia pada 18 Desember 2012 dengan kode saham WIIM. Melantainya Perseroan di bursa telah memberikan penguatan pada struktur modal Perseroan sehingga Perseroan mampu melakukan pengembangan usaha seraya tak lupa menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (“GCG”). Transformasi Perseroan menjadi perusahaan publik membuat Perseroan semakin teguh dan bertekad kuat menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola perusahaan.

#### 9. TSPC (PT. Tempo Scan Pacific, Tbk)

PT. Tempo Scan Pacific, Tbk dan entitas anaknya merupakan bagian dari kelompok usaha swasta nasional Grup Tempo yang telah memulai usaha perdagangan produk farmasi sejak tahun 1953. PT. Tempo Scan Pacific, Tbk dibentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1991 dan semula bernama PT. Scanchemie yang pada tahun 1970 memulai kegiatan produksi komersial produk farmasi dalam skala besar. Seiring dengan perjalanan waktu, perseroan melalui entitas anaknya memproduksi produk kosmetik dan produk konsumen sejak tahun 1977.

Pada tahun 1994 perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan saham - sahamnya sejumlah 75.000.000 lembar saham di Bursa Efek Indonesia / BEI (dahulu Bursa Efek Jakarta / BEI). Pada tahun 1995 jumlah saham tersebut telah meningkat menjadi 150.000.000 lembar saham dengan dirubahnya nilai nominal masing - masing saham Perseroan dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per lembar saham (pemecahan saham).

Selanjutnya pada tahun 1998, BEI telah menyetujui pencatatan saham perseroan sebanyak 300.000.000 lembar saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas yang pertama, sehingga jumlah saham tercatat Perseroan seluruhnya berjumlah 450.000.000 lembar saham.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel untuk melakukan analisis data, seperti variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*),

sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial. Ada juga beberapa pengertian dan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan penghindaran atau meminimalisir pajak yang masih taat pada hukum yang berlaku. Variabel ini menggunakan proksi *cash effective tax rate* (CETR) (Chen, *et al.*,2010). CETR (*cash effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak, sebaliknya jika semakin kecil CETR ini mengindikasikan semakin besar peluang tingkat penghindaran pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber : Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Ukuran Perusahaan

Pengukuran yang digunakan untuk variabel ukuran perusahaan menggunakan proksi *logaritma natura* total aktiva. *Logaritma natura* digunakan untuk mempermudah penelitian, skala pengukuran pada variabel independen maupun variabel dependen menggunakan rasio dan

pengklasifikasian ukuran perusahaan menggunakan total aset perusahaan sebagai berikut :

$$\text{“Ukuran Perusahaan = LN (Total Aset)”}$$

Sumber : N. Hendrawati, 2016

b. Dewan Komisaris

Merupakan jumlah keanggotaan yang berasal dari luar perusahaan (*outside director*) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan yang diukur dengan persentase jumlah anggota *outside director* dari seluruh anggota dewan (persentase anggota dewan komisaris).

$$DK = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber : Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018

c. Kepemilikan Manajerial

Merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham beredar yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total saham beredar.

$$KM = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Manajemen}}{\text{Modal Saham Perusahaan}}$$

Sumber : Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018

## **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data penelitian ini menggunakan SPSS versi 24, mengacu pada (Ghozali, 2012) meliputi :

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah proses pengumpulan dan peringkasan data, serta upaya untuk menggambarkan hasil karakteristik yang penting pada data yang telah diorganisir tersebut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2012, 19).

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan uji hipotesis maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepastian bahwa model regresi yang digunakan tidak ada masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedasitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi *ordinary least square*



(OLS) akan sesuai *best linear unbiased estimator* (BLUE) artinya model regresinya dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2016).

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016, 154). Uji normalitas menggunakan uji non parametik *kolmogorov-smirov* (K-S) satu sampel, dengan kriteria pengujian :

- 1) Variabel terdistribusi normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$ .
- 2) Variabel terdistribusi tidak normal jika nilai signifikan  $< 0,05$ .

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas terjadi pada model regresi dengan lebih dari satu variabel independen (regresi berganda) di mana terjadi korelasi yang kuat antar variabel dependen (Wahyono, 2010). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor*.

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum adalah :

- 1) Jika nilai *tolerance* > 0,10 persen dari nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *tolerance* < 0,10 persen dari nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Ghozali, 2016 : 134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SPRESID). Jika grafik *scatterplot* menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016, 107).

**Tabel III.1**

**Klasifikasi nilai d Uji Durbin Watson**

Nilai	Keterangan
$0 < d < d_l$	Autokorelasi positif
$d_l \leq d \leq d_u$	Tidak dapat disimpulkan

$4 - d_l < d < 4$	Autokorelasi negatif
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Tidak dapat disimpulkan
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada autokorelasi

Sumber : (Imam Ghozali, 2016, 108)

### 3. Uji Statistik

#### a. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda menjelaskan mengenai hubungan antar dua variabel yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu regresi, yang digunakan untuk mengetahui rata-rata dari variabel dependen (Kurniawan, 2018). Analisis regresi berganda berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas atau penjelas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel bebas atau penjelas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TA = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 DK + \beta_3 KM + \varepsilon$$

Keterangan :

TA = *tax avoidance*

$\alpha$  = Nilai konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien regresi

SIZE = Ukuran perusahaan

DK = Dewan komisaris

KM = Kepemilikan manajerial

$\varepsilon$  = Standard error (residual)

#### **b. Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2013), mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) dimana semakin nilai  $R^2$  mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terkait. Sebaliknya jika  $R^2$  semakin mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali, 2016, 83).

Kelemahan mendasar pengguna koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap

tambahan satu variabel bebas maka R<sup>2</sup> pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Untuk mengatasi hal itu, adjusted R<sup>2</sup> bisa digunakan pada saat mengevaluasi model regresi. Dengan adanya koreksi dalam adjusted R<sup>2</sup> maka nilainya tidak selalu naik apabila ditambahkan variabel penjelas.

#### **4. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesa seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

##### **a. Uji F**

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) Bila nilai signifikansi  $F < 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Bila signifikansi  $F > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**b. Uji t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016, 97). Pengujian secara parsial ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara variabel t hitung dan tabel :
  - a) Jika dihitng  $> t$  tabel maka  $H_0$  ditolak atau variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
  - b) Jika dihitng  $< t$  tabel maka  $H_0$  diterima atau variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

## BAB IV

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa perusahaan-perusahaan kelompok sub sektor industri barang konsumsi dan produk sejenis di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018 yang mengeluarkan *annual report* dan laporan keuangan tahunan dengan informasi mempunyai laba sebelum pajak. Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 perusahaan. Supaya dapat menentukan banyaknya perusahaan yang bisa dijadikan sampel penelitian dengan dilakukan nya kriteria seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.1

#### Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018 yang tidak pernah <i>delisting</i> selama periode tersebut	42
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama 4 tahun berturut - turut, yaitu tahun 2015 - 2018	(10)
Laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing selama tahun 2015 - 2018	0
Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2015 - 2018	(4)
Laporan tidak memiliki informasi mengenai variabel secara lengkap	(15)



Laporan keuangan tidak di audit	(4)
Jumlah sampel	9

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas dapat diketahui 9 perusahaan yang dapat dijadikan sampel selama periode yang sesuai penelitian. Periode pengamatan penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 atau selama 4 tahun sehingga jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 36 sampel penelitian.

Berikut nama dan kode emiten perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang digunakan sebagai penelitian penulis adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2**

**Daftar Nama dan Kode Emiten**

No	Kode Emiten Perusahaan	Nama Emiten Perusahaan
1	GGRM	PT. Gudang Garam, Tbk.
2	KAEF	PT. Kimia Farma, Tbk.
3	KINO	PT. Kino Indonesia, Tbk
4	PYFA	PT. Pyridam Farma, Tbk
5	SKBM	PT. Sekar Bumi, Tbk
6	SKLT	PT. Sekar Laut, Tbk
7	ULTJ	PT. Ultra Jaya, Tbk
8	WIIM	PT. Wismilak Indah Makmur, Tbk

9	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific, Tbk
---	------	-----------------------------

Sumber : Data laporan keuangan

## 1. Penyajian Data Penelitian

Dari 9 perusahaan sampel yang digunakan untuk penelitian selama waktu 4 tahun periode 2015-2018. Berikut hasil penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini :

### a. CETR

Data beban pajak penghasilan tersebut diperoleh dari laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan perusahaan, setelah direkapitulasi maka diperoleh beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.3**

### **CETR Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumsi**

**31 Desember 2015 - 2018**

<b>Kode Emiten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
GGRM	0.21	0.26	0.25	0.27
KAEF	0.19	0.18	0.15	0.28
KINO	0.07	0.40	0.38	0.17

PYFA	0.35	0.32	0.21	0.26
SKBM	0.45	0.56	0.43	0.51
SKLT	0.56	0.31	0.30	0.17
ULTJ	0.15	0.27	0.33	0.30
WIIM	0.23	0.33	0.54	0.25
TSPC	0.64	0.64	0.72	0.72

Sumber : Data laporan keuangan

Berdasarkan tabel IV.3 diatas diketahui tingkat CETR tertinggi memiliki nilai 72 % dan memiliki nilai terendah 7 %.. Artinya bahwa semakin tinggi persentase nya membuat peluang tindakan penghindaran pajak semakin sulit dilakukan, sedangkan semakin kecil persentase nya membuat peluang tindakan penghindaran pajak semakin mudah dilakukan.

#### **b. Ukuran Perusahaan**

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menghitung logaritma natura dari keseluruhan total aset yang dimiliki setiap perusahaan. Setiap ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak dan perusahaan yang besar cenderung lebih baik dalam melakukan praktik perencanaan pajak. Berikut tabel hasil perhitungan ukuran perusahaan (SIZE) :

**Tabel IV.4****Total Aset Perusahaan Barang Konsumsi****Tahun 2015-2018**

TAHUN	KODE PERUSAHAAN	TOTAL ASET
2015	GGRM	63.505.413
2015	KAEF	3.434.879.313.034
2015	KINO	3.211.234.658.570
2015	PYFA	159.951.537.229
2015	SKBM	764.484.248.710
2015	SKLT	377.110.748.359
2015	ULTJ	3.539.995.910.248
2015	WIIM	1.342.700.045.391
2015	TSPC	6.284.729.099.203
2016	GGRM	62.951.634
2016	KAEF	4.612.562.541.064
2016	KINO	3.284.504.424.358
2016	PYFA	167.062.795.608
2016	SKBM	1.001.657.012.004
2016	SKLT	568.239.939.951
2016	ULTJ	4.239.199.641.365
2016	WIIM	1.353.634.132.275
2016	TSPC	6.585.807.349.438

2017	GGRM	66.759.930
2017	KAEF	6.096.148.972.533
2017	KINO	3.237.595.219.274
2017	PYFA	159.563.931.041
2017	SKBM	1.623.027.475.045
2017	SKLT	636.284.210.210
2017	ULTJ	5.186.940
2017	WIIM	1.225.712.093.041
2017	TSPC	7.434.900.309.021
2018	GGRM	69.097.219
2018	KAEF	9.460.427.317.681
2018	KINO	3.592.164.205.408
2018	PYFA	187.057.163.854
2018	SKBM	1.771.365.972.009
2018	SKLT	747.293.725.435
2018	ULTJ	5.555.871
2018	WIIM	1.255.573.914.558
2018	TSPC	7.869.975.060.326

Sumber : Data laporan keuangan

**Tabel IV.5**

**Ukuran Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumsi**

**31 Desember 2015 - 2018**

KODE EMITEN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
GGRM	17,966	17,957	18,061	18,051
KAEF	28,865	29,159	29,438	29,878
KINO	28,797	28,820	28,805	28,909
PYFA	25,798	25,841	25,795	25,954
SKBM	27,362	27,632	28,115	28,202
SKLT	26,655	27,065	27,178	27,339
ULTJ	28,895	29,075	15,461	15,530
WIIM	27,925	27,933	27,834	27,858
TSPC	29,469	29,515	29,637	29,694

a laporan keuangan

Ukuran perusahaan diukur dengan menghitung nilai *logaritma natura* dari total aset perusahaan-perusahaan sampel. Menunjukkan hasil persentase tertinggi sebesar 29,878 sedangkan persentase terkecil sebesar 15,461 yang artinya bahwa SIZE pada data diatas dapat dikatakan sudah sangat baik karena perusahaan sangat kuat dalam memiliki aset yang banyak, sehingga jika sewaktu-waktu mengalami kerugian perusahaan dapat menutupnya dengan menggunakan aset itu.

**c. Dewan Komisaris**

Data dewan komisaris diperoleh dari laporan *annual report* pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Setelah dilakukan rekapitulasi maka penulis memperoleh hasil jumlah dewan komisaris dan komisaris independen untuk masing-masing perusahaan sebagai berikut :

**Tabel IV.6**

**Proporsi Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Independen**

**Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumsi**

**31 Desember 2015 - 2018**

<b>Kode Emiten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
GGRM	0,5	0,5	0,5	0,667
KAEF	0,333	0,4	0,4	0,4
KINO	0,333	0,5	0,5	0,5
PYFA	0,5	0,5	0,5	0,5
SKBM	0,333	0,333	0,333	0,333
SKLT	0,333	0,333	0,333	0,333
ULTJ	0,333	0,333	0,333	0,333
WIIM	0,333	0,333	0,333	0,333
TSPC	0,5	0,5	0,6	0,6

ber : Data laporan keuangan

Berdasarkan tabel IV.6 diatas menunjukkan angka proporsi tertinggi sebesar 0,667, sedangkan angka proporsi terendah sebesar 0,333. Sehingga semakin tinggi tingkat proporsi maka pengawasan yang

dilakukan terhadap pihak manajemen akan menjadi baik untuk melakukan *tax avoidance*, sedangkan jika semakin rendah tingkat proporsi maka pengawasan yang dilakukan manajemen tidak dapat menekan untuk melakukan *tax avoidance*.

**d. Kepemilikan Manajerial**

Data kepemilikan saham pihak manajemen diperoleh dari laporan *annual report* pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Setelah dilakukan rekapitulasi maka diperoleh jumlah kepemilikan saham untuk masing - masing perusahaan sebagai berikut :

**Tabel IV.7**

**Kepemilikan Saham Manajemen**

**Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumsi**

**31 Desember 2015-2018**

TAHUN	KODE PERUSAHAAN	TOTAL KEPEMILIKKAN MANAJERIAL	MODAL SAHAM PERUSAHAAN
2015	GGRM	17.701.400	1.924.088.000
2015	KAEF	5.000.000.000	555.400.000.000
2015	KINO	15.000.000.000	142.857.150.000
2015	PYFA	123.480.000	535.080.000
2015	SKBM	29.036.200	936.530.894
2015	SKLT	1.668.640	690.740.500



2015	ULTJ	517.156.900	2.888.382.000
2015	WIIM	916.432.970	2.099.873.760
2015	TSPC	3.070.000	4.500.000.000
2016	GGRM	12.964.930	1.924.088.000
2016	KAEF	5.000.000.000	5.554.000.000
2016	KINO	150.000.000	1.428.571.500
2016	PYFA	123.480.000	535.080.000
2016	SKBM	30.232.885	936.530.894
2016	SKLT	1.938.640	621.666.450
2016	ULTJ	331.828.800	2.888.382.000
2016	WIIM	926.231.812	2.099.873.760
2016	TSPC	2.679.500	4.500.000.000
2017	GGRM	12.946.930	1.924.088.000
2017	KAEF	5.000.000.000	5.554.000.000
2017	KINO	151.356.800	1.428.571.500
2017	PYFA	123.480.000	535.080.000
2017	SKBM	38.087.991	1.726.003.217
2017	SKLT	4.603.391	621.666.450
2017	ULTJ	331.828.800	2.888.382.000
2017	WIIM	960.920.232	2.099.873.760
2017	TSPC	2.029.000	4.500.000.000
2018	GGRM	12.946.930	1.924.088.000
2018	KAEF	5.000.000.000	5.554.000.000

2018	KINO	153.623.000	1.428.571.500
2018	PYFA	160.289.311	535.080.000
2018	SKBM	38.087.991	1.726.003.217
2018	SKLT	5.687.044	621.666.450
2018	ULTJ	3.910.143.100	11.553.528.000
2018	WIIM	1.299.935.117	2.099.873.760
2018	TSPC	2.029.000	4.500.000.000

Sumber : Data laporan keuangan

**Tabel IV.8**

**Kepemilikan Saham Manajemen**

**Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumsi**

**31 Desember 2015-2018**

<b>Kode Emiten</b>	2015	2016	2017	2018
<b>GGRM</b>	0,0091	0,0067	0,0067	0,0067
<b>KAEF</b>	0,0090	0,9002	0,9002	0,9002
<b>KINO</b>	0,1049	0,1049	0,1059	0,1705
<b>PYFA</b>	0,2307	0,2307	0,2307	0,2995
<b>SKBM</b>	0,0310	0,0322	0,0220	0,0220
<b>SKLT</b>	0,0024	0,0031	0,0074	0,0091
<b>ULTJ</b>	0,1790	0,1148	0,1148	0,3384

<b>WIIM</b>	0,4364	0,4410	0,4576	0,6190
<b>TSPC</b>	0,0006	0,0005	0,0004	0,0004

Sumber : Data laporan keuangan

Berdasarkan tabel IV.8 diatas diketahui persentase kepemilikan saham tertinggi sebesar 0,9002, sedangkan persentase kepemilikan saham terendah sebesar 0,0004. Dengan semakin besar persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan meningkatkan sifat manajemen untuk meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan jika semakin kecil persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan menurunkan sifat manajemen untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

## 2. Penyajian Data Variabel Penelitian

Berikut ini adalah data yang disajikan berupa data variabel penelitian yang selanjutnya akan dilakukan pengujian data, uji statistik dan uji hipotesis sebagai berikut :

**Tabel IV.9**

### **Data Variabel Penelitian**

<b>N</b>	<b>CETR</b>	<b>LN</b>	<b>DK</b>	<b>KM</b>
1	0,21	17,966	0,5	0,00919
2	0,19	28,865	0,3	0,00900
3	0,07	28,797	0,3	0,10499
4	0,35	25,798	0,5	0,23076
5	0,45	27,362	0,3	0,03100

6	0,56	26,655	0,3	0,00241
7	0,15	28,895	0,3	0,17904
8	0,23	27,925	0,3	0,43642
9	0,64	29,469	0,5	0,00068
10	0,26	17,957	0,5	0,00673
11	0,18	29,159	0,4	0,90025
12	0,40	28,820	0,5	0,10499
13	0,32	25,841	0,5	0,23076
14	0,56	27,632	0,3	0,03228
15	0,31	27,065	0,3	0,00311
16	0,27	29,075	0,3	0,11488
17	0,33	27,933	0,3	0,44108
18	0,64	29,515	0,5	0,00059
19	0.25	18,061	0,5	0,00672
20	0.15	29,438	0,4	0,90025
21	0.38	28,805	0,5	0,10594
22	0.21	25,795	0,5	0,23076
23	0.43	28,115	0,3	0,02206
24	0.30	27,178	0,3	0,00740
25	0.33	15,461	0,3	0,11488
26	0.54	27,834	0,3	0,45760
27	0.72	29,637	0,6	0,00045
28	0.27	18,051	0,6	0,00672
29	0.28	29,878	0,4	0,90025
30	0.17	28,909	0,5	0,10753
31	0.26	25,954	0,5	0,29956
32	0.51	28,202	0,3	0,02206
33	0.17	27,339	0,3	0,00914
34	0.30	15,530	0,3	0,33843
35	0.25	27,858	0,3	0,61905
36	0.72	29,694	0,6	0,00045

Sumber : Data sekunder yang diolah

## B. Analisis Hasil Penelitian

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dari data penelitian berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standard deviasi masing-masing tabel yang disajikan dalam berikut ini :

**Tabel IV.10**

#### Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ukuran perusahaan	36	15.462	29.878	26.29007	4.319520
dewan komisaris	36	.333	.667	.41852	.098382
kepemilikan manajerial	36	.00045	.90025	.1941006	.26851366
penghindaran pajak	36	.071	.724	.34827	.169454
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

Variabel penghindaran pajak (Y) memiliki *mean* 0,34827 dengan standard deviasi 0,169454. Penghindaran pajak tertinggi sebesar 0,724 dan terendah sebesar 0,071. Berdasarkan *range* tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak cukup baik, karena nilai standard deviasi

(0,169454) mempunyai nilai yang jauh lebih kecil dari nilai *mean* (0,34827). Karena semakin kecil angka persentase semakin baik untuk melakukan peluang penghindaran pajak.

Variabel ukuran perusahaan (X1) memiliki *mean* 26,29007 dengan standard deviasi 4,319520. Ukuran perusahaan tertinggi sebesar 29,878 dan terendah sebesar 15,462. Berdasarkan *range* tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat ukuran perusahaan cukup tinggi, karena nilai standard deviasi (4,319520) tersebut jauh lebih kecil dari nilai *mean* (26,29007) yang artinya jika tingkat persentase semakin besar maka perusahaan sangat baik dalam sisi aset, jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami pengeluaran yang besar maka peran aset perusahaan sangat diperlukan dalam menutupi biaya-biaya operasional pada perusahaan tersebut.

Variabel dewan komisaris (X2) memiliki *mean* 0,41852 dengan standard deviasi sebesar 0,098382. Dewan komisaris tertinggi sebesar 0,667 dan terendah sebesar 0,333. Berdasarkan *range* tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat persentase dewan komisaris sudah baik, Karena nilai standard deviasi (0,098382) tersebut jauh lebih kecil dari nilai *mean* (0,41852) yang artinya menunjukkan bahwa tingkat persentase diatas sudah mematuhi peraturan BAPEPAM-LK dan BEI karena peraturan persentase minimal 30 % dari total komisaris yang ada.

Variabel kepemilikan manajerial (X3) memiliki *mean* sebesar 0,1941006 dengan standard deviasi 0,26851366. Nilai kepemilikan manajerial minimum sebesar 0,00045 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,90025. Berdasarkan *range* tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat persentase kepemilikan

manajerial sangat besar. Karena nilai standard deviasi (0,26851366) tersebut jauh lebih besar dari nilai *mean* (0,1941006) yang artinya menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen kurang baik, karena manajemen sendiri mempunyai persentase kepemilikan yang kecil maka dari itu, manajemen cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan jumlah kepemilikan yang minim.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian regresi linear berganda, dalam memperoleh penelitian yang akurat diperlukan pengujian dengan asumsi klasik, yaitu sebagai berikut :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogrov-Smirnov*. *One Sample Kolmogrov-Smirnov* yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik dan analisis grafik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non parametik *One Sample Kolmogrov-Smirnov* yang mengharuskan nilai *Asymp.Sig. (2 tailed)*  $> 0,05$  yang berarti data tersebut telah terdistribusi secara normal. Namun, jika nilai *Asymp.Sig. (2 tailed)*  $< 0,05$  berarti data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Berikut hasil uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.11**

**Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov-Smirnov***

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14668120
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.110
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

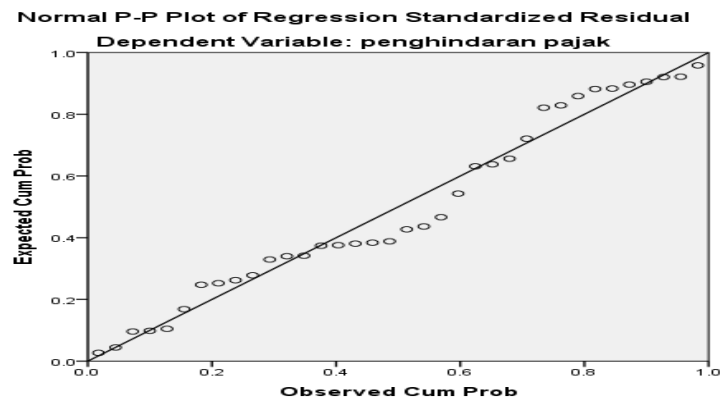
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig. (2 tailed)* sebesar 0,195. nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan semua data telah terdistribusi secara normal. Selain uji *Kolmogrov-Smirnov*, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan alat uji diagram P-P Pot, dimana data yang dimiliki distribusi normal akan berada disekitar garis



diagonal dan berada searah dengan garis diagonal tersebut. Berikut grafiknya yang ada di bawah ini :

**Gambar IV.1**

**Hasil Uji P-P Plot**



Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

Dengan melihat tampilan grafik normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar tidak terlalu jauh dari sekitar garis diagonalnya, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation*

*Factor*). Regresi yang terbebas dari masalah multikolinearitas apabila  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ , maka data tersebut tidak ada multikolinieritas. Berikut ini hasil uji multikolinieritas dibawah ini :

**Tabel IV.12**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
ukuran perusahaan	.943	1.060
dewan komisaris	.943	1.061
kepemilikan manajerial	.928	1.078

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

Hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* yang dimiliki variabel ukuran perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,943 dan nilai VIF sebesar 1,060. Variabel dewan komisaris memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,943 dan nilai VIF sebesar 1,061. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai *tolerance* sebesar

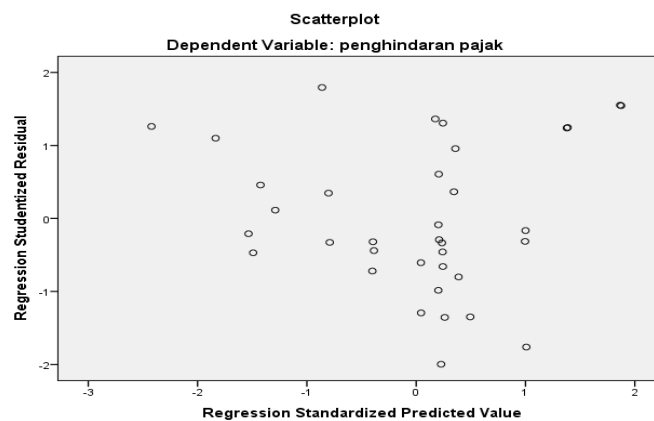
0,928 dan nilai VIF sebesar 1,078. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat masalah pada uji multikolinieritas dan model persamaan regresi dapat digunakan pada penelitian ini.

**c. Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :

**Gambar IV.2**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

Berdasarkan hasil scatterplot gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan membentuk pola yang tidak teratur diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model terdapat korelasi antara variabel pengganggu pada periode t dengan variabel pengganggu pada periode t - 1 atau periode sebelumnya.

**Tabel IV.13**

#### **Hasil Uji Autokorelasi**

##### **Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.830

a. Predictors: (Constant), kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dewan komisaris

b. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

Berdasarkan tabel Durbin - Watson maka didapatkan nilai dL 1,295 dan nilai dU 1,653. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai dU = 1,653 dan nilai  $4 - dU = 2,347$  atau  $1,653 < 1,830 < 2,347$ . Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi.

### 3. Hasil Uji Regresi Berganda

#### a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil uji analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.14**

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-.112	.211	
	ukuran perusahaan	.013	.006	.330
	dewan komisaris	.392	.271	.227
	kepemilikan manajerial	-.227	.100	-.359

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

:

Pengolahan data SPSS versi 24

Analisis data menggunakan teknis analisis regresi linear berganda melalui model Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan tabel diatas, berikut persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{CETR} = -0,112 + 0,013 \text{ Size} + 0,392 \text{ DK} - 0,227 \text{ KM} + e$$

Nilai konstanta sebesar -0,112 menjelaskan jika ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai penghindaran pajak adalah -0,112.

Nilai koefisien ukuran perusahaan (X1) sebesar 0,013. Menunjukkan bahwa ketika ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami kenaikan sebesar 0,013, sedangkan sisanya 0,987 dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Nilai koefisien dewan komisaris (X2) sebesar 0,392. Menunjukkan bahwa ketika dewan komisaris mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak mengalami kenaikan sebesar 0,392, sedangkan sisanya sebesar 0,608 dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Nilai koefisien kepemilikan manajerial (X3) sebesar 0,227. menunjukkan bahwa ketika kepemilikan manajerial mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,227, sedangkan sisanya sebesar 0,773 dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## **C. Pengujian Hipotesa**

### **1. Hasil Uji Parsial (t)**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0,05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasari pada nilai signifikansi. Hasil uji parsial (t) disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.15**

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

S

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.112	.211		-.531	.599
	ukuran perusahaan	.013	.006	.330	2.096	.044
	dewan komisaris	.392	.271	.227	1.443	.159
	kepemilikan manajerial	-.227	.100	-.359	-2.261	.031

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

**a. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan tabel diatas pengujian variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki tingkat signifikan  $0,044 < 0,050$  maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa pertama diajukan dalam penelitian (H1) diterima.

**b. Pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan tabel diatas pengujian variabel dewan komisaris (DK) memiliki tingkat signifikan  $0,159 > 0,050$  maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa kedua diajukan dalam penelitian (H2) ditolak.

**c. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan tabel diatas pengujian variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki tingkat signifikan  $0,031 < 0,050$  maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa ketiga diajukan dalam penelitian (H3) diterima.

**2. Hasil Uji Simultan (F)**

uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel - variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh secara bersama - sama. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0,05. kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasari pada nilai signifikansi. Berikut ini adalah tabel yang menggunakan hasil uji simultan (F) :

**Tabel IV.16**



## Hasil Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.252	3	.084	3.569	.025 <sup>b</sup>
	Residual	.753	32	.024		
	Total	1.005	35			

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

b. Predictors: (Constant), kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dewan komisaris

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 24

Dalam pengujian simultan (uji F) berdasarkan tabel diatas pada uji F diketahui bahwa ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial memiliki nilai F hitung 3,569 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 dengan nilai tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dihasilkan perbandingan ( $0,025 < 0,05$ ) maka H4 diterima yang artinya ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara bersama-sama signifikan terhadap penghindaran pajak.

### D. Pembahasan

#### 1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga H1 menyatakan bahwa ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sampel

perusahaan yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan perbankan pada penelitian sebelumnya.

## **2. Pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak**

Variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga H2 menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Cahyono (2016) bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya cara persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya sehingga terjadi hasil yang sama.

## **3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak**

Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga H3 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nikmah (2018) bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya persamaan sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur dan juga lama periode yang digunakan selama 4 tahun.

## **4. Pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.**

Variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial secara bersama- sama berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Sehingga H4 menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ratna & Pramudito, 2018). Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial mempunyai suatu hubungan yang besar terhadap penghindaran pajak itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor manufaktur industri barang konsumsi dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2018 (4 tahun). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR).

Dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesa terhadap seluruh variabel sebagai berikut :

1. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan nya sebesar  $0,044 < 0,050$ . Hasil penelitian ini menyimpulkan H1 yang diajukan dalam penelitian ini terbukti.
2. Variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan nya sebesar  $0,159 > 0,050$ . Hasil penelitian ini menyimpulkan H2 yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti.
3. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan nya sebesar  $0,031 < 0,050$ . Hasil penelitian ini menyimpulkan H3 yang diajukan dalam penelitian ini terbukti.
4. Variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan signifikan nya sebesar  $0,025 < 0,05$ . Hasil penelitian ini menyimpulkan H4 yang diajukan dalam penelitian ini terbukti.

## **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan tentunya. Nantinya penulis akan mengungkapkan keterbatasan tersebut, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dikemudian waktu agar hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian yang digunakan masih relatif singkat hanya 4 (empat) tahun selama 2015-2018.
2. Pengukuran variabel independen total asset, proporsi dewan komisaris, proporsi kepemilikan manajerial. Sedangkan pengukuran penghindaran pajak menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 3 variabel, yaitu ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial.

### **C. Saran**

Supaya penelitian ini bisa lebih baik kedepannya, maka penulis memberikan saran atas keterbatasan tersebut :

1. Bagi akademis, diharapkan agar :
  - a) Memperbanyak periode penelitian supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.
  - b) Jika hasil penelitian kedepannya ingin lebih baik, disarankan untuk pengukuran menggunakan pengukuran yang lain.

- c) Variabel kepemilikan manajerial merupakan variabel yang paling sulit dicari data nya dari antara variabel yang lain di dalam penelitian ini.
- d) Indikator yang digunakan untuk penghindaran pajak bisa menggunakan perhitungan ETR supaya hasil penelitian menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, Hal 95-189.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2011. *Factbook BAPEPAM*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyono, Dedy Dyas. Rita Andini dan Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. *Journal of Financial Economic*.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana. I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia.

- Dyreng, Scott. Et. al. “*The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*”. *Social Science Research Network*, 2010
- Friese, A., Link, S. P., & Mayer, S. (2006, Januari 19). *Social Science Research Network Retrieved*  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=877900](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=877900)
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Progam SPSS”, Salemba Empat, Jakarta. 2016.
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariat dengan Progam SPSS”. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. 2011.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economic* 50 (2010), 127-178.
- Hery. Analisis Kinerja Manajemen. Jakarta : Grasindo, 2015. - Kajian Riset Akuntansi. Jakarta : Grasindo, 2017.
- Hamdani, “*Good Corporate Governance*”, Mitra Wacana Media, Jakarta 2016.
- Hamid, Abdul. “Buku Panduan Penulisan Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2012.
- Julianti, Defy Kurnia. 2015. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013., Semarang., Universitas Negeri Semarang.
- Mulyani, Sri. Anita Wijayanti dan Endang Masitoh. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI).
- Nikmah, Hanik. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.
- Pramudito, Batara Wiryo. Maria M. Ratna Sari. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*.



Putra, Wisnu Agung Indra Purbaya Atmaja. 2015. Pengaruh Mekanisme Internal Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Rego, S. O. (2003). *Tax Avoidance Activites of U.S. Multinational Corporations*. University of IOWA.

Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat, Edisi Keempat.

Wijayanti, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance, Corporate Social Respondbility* Terhadap Penghindaran Pajak.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kevin

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 April 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Taman Royal 3 Blok A.8 / 26, Tangerang

No Handphone : 0852-1356-7919

IPK terakhir : 3,14



### Riwayat Pendidikan

- SD : SD Strada Santo Fransiskus (2004-2010)
- SMP : SMP Strada Santa Maria 2 (2010-2013)
- SMK : SMP Strada Damos (2013-2016)
- Universitas : Universitas Buddhi Dharma (2016-2020)

### Seminar / Pelatihan :

- Pelatihan Pajak Bravert A
- Seminar "Tax Amnesty"

- Seminar “Big Chances Of Being Success”
- Seminar “Carrer Inspiration Talk”
- Seminar “Character Building”
- Seminar “Leadership Building”
- Seminar “Pengenalan Kehidupan Kampus”
- Seminar “Penginputan Data kelengkapan SKPI”
- Seminar “Sitasi & Referensi Dalam Karya Ilmiah”
- Seminar “Pelatihan Penggunaan Aplikasi SPSS”
- Seminar “Your Social Media Your Treasure”



## SURAT IZIN SURVEI & RISET

No.SISR-10982/ICaMEL/02-2020

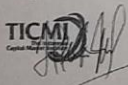
Menunjuk surat nomor 027/FB-III/KP-KM.10/02/2020 tanggal 03 Februari 2020 perihal permohonan izin penelitian bagi Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma bersama ini kami memberikan izin mengakses dan menggunakan data-data pasar modal yang tersimpan di perusahaan kami untuk keperluan riset dan penyusunan Skripsi kepada peneliti di bawah ini:

Nama Pemohon : Kevin  
Nomor Pokok : 20160100190  
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI 2015-2018)

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Februari 2020

PT Indonesian Capital Market Electronic  
Library

  
TICMI  
Capital Market Institute

**Hery Mulyawan**  
Head of Data Services

SALINAN SESUAI ASLINYA

**PT Indonesian Capital Market Electronic Library**

Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 1st Floor | Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia | (Ph) 021-515 2318, (Fax) 021-515 2319

TAHUN	KODE PERUSAHAAN	TOTAL ASET
2015	GGRM	63.505.413
2015	KAEF	3.434.879.313.034
2015	KINO	3.211.234.658.570
2015	PYFA	159.951.537.229
2015	SKBM	764.484.248.710
2015	SKLT	377.110.748.359
2015	ULTJ	3.539.995.910.248
2015	WIIM	1.342.700.045.391
2015	TSPC	6.284.729.099.203
2016	GGRM	62.951.634
2016	KAEF	4.612.562.541.064
2016	KINO	3.284.504.424.358
2016	PYFA	167.062.795.608
2016	SKBM	1.001.657.012.004
2016	SKLT	568.239.939.951
2016	ULTJ	4.239.199.641.365
2016	WIIM	1.353.634.132.275
2016	TSPC	6.585.807.349.438
2017	GGRM	66.759.930
2017	KAEF	6.096.148.972.533
2017	KINO	3.237.595.219.274
2017	PYFA	159.563.931.041

2017	SKBM	1.623.027.475.045
2017	SKLT	636.284.210.210
2017	ULTJ	5.186.940
2017	WIIM	1.225.712.093.041
2017	TSPC	7.434.900.309.021
2018	GGRM	69.097.219
2018	KAEF	9.460.427.317.681
2018	KINO	3.592.164.205.408
2018	PYFA	187.057.163.854
2018	SKBM	1.771.365.972.009
2018	SKLT	747.293.725.435
2018	ULTJ	5.555.871
2018	WIIM	1.255.573.914.558
2018	TSPC	7.869.975.060.326

TAHUN	KODE PERUSAHAAN	TOTAL DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	TOTAL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
2015	GGRM	2	4
2015	KAEF	1	3
2015	KINO	1	3
2015	PYFA	2	4
2015	SKBM	1	3

2015	SKLT	1	3
2015	ULTJ	1	3
2015	WIIM	1	3
2015	TSPC	2	4
2016	GGRM	2	4
2016	KAEF	2	5
2016	KINO	2	4
2016	PYFA	2	4
2016	SKBM	1	3
2016	SKLT	1	3
2016	ULTJ	1	3
2016	WIIM	1	3
2016	TSPC	3	6
2017	GGRM	2	4
2017	KAEF	2	5
2017	KINO	2	4
2017	PYFA	2	4
2017	SKBM	1	3
2017	SKLT	1	3



2017	ULTJ	1	3
2017	WIIM	1	3
2017	TSPC	3	5
2018	GGRM	2	3
2018	KAEF	2	5
2018	KINO	2	4
2018	PYFA	2	4
2018	SKBM	1	3
2018	SKLT	1	3
2018	ULTJ	1	3
2018	WIIM	1	3
2018	TSPC	3	5

TAHUN	KODE PERUSAHAAN	TOTAL KEPEMILIKKAN MANAJERIAL	MODAL SAHAM PERUSAHAAN
2015	GGRM	17701400	1924088000
2015	KAEF	5000000000	555400000000

2015	KINO	15000000000	142857150000
2015	PYFA	123480000	535080000
2015	SKBM	29036200	936530894
2015	SKLT	1668640	690740500
2015	ULTJ	517156900	2888382000
2015	WIIM	916432970	2099873760
2015	TSPC	3070000	4500000000
2016	GGRM	12964930	1924088000
2016	KAEF	5000000000	5554000000
2016	KINO	150000000	1428571500
2016	PYFA	123480000	535080000
2016	SKBM	30232885	936530894
2016	SKLT	1938640	621666450
2016	ULTJ	331828800	2888382000
2016	WIIM	926231812	2099873760
2016	TSPC	2679500	4500000000
2017	GGRM	12946930	1924088000
2017	KAEF	5000000000	5554000000
2017	KINO	151356800	1428571500
2017	PYFA	123480000	535080000

2017	SKBM	38087991	1726003217
2017	SKLT	4603391	621666450
2017	ULTJ	331828800	2888382000
2017	WIIM	960920232	2099873760
2017	TSPC	2029000	4500000000
2018	GGRM	12946930	1924088000
2018	KAEF	5000000000	5554000000
TAHUN	KODE	TOTAL KAS YANG	LABA SEBELUM
2018	PERUSAHAAN KINO	DIBAYARKAN 153623000	PAJAK 1428571500
2015	GGRM	1,830,188	8,635,275
2018	PYFA	160289311	535080000
2015	KAEF	68,190,694,925	354,904,735,867
2018	SKBM	38087991	1726003217
2015	KINO	24,038,959,718	336,923,332,210
2018	SKLT	5687044	621666450
2015	PYFA	1,605,929,780	4,554,931,095
2018	ULTJ	3910143100	11553528000
2015	SKBM	24,432,811,781	53,629,853,878
2018	WIIM	1299935117	2099873760
2018	TSPC	2029000	4500000000

2015	SKLT	15,451,631,432	27,376,238,223
2015	ULTJ	111,720,131,452	700,675,250,229
2015	WIIM	41,390,838,940	177,962,941,779
2015	TSPC	457,485,911,004	707,110,932,867
2016	GGRM	2,405,902	8,931,136
2016	KAEF	72,733,809,240	383,025,924,670
2016	KINO	89,613,261,669	219,312,978,691
2016	PYFA	2,274,563,489	7,053,407,169
2016	SKBM	17,322,736,215	30,809,950,308
2016	SKLT	8,026,883,297	25,166,206,536
2016	ULTJ	253,029,785,147	932,482,782,652
2016	WIIM	45,325,281,371	136,662,997,252
2016	TSPC	466,394,302,993	718,958,200,369
2017	GGRM	2,638,900	10,436,512
2017	KAEF	71,236,100,650	449,709,762,422
2017	KINO	54,442,838,200	140,964,951,060
2017	PYFA	2,094,731,164	9,599,280,773
2017	SKBM	13,706,785,039	31,761,022,154
2017	SKLT	8,237,550,980	27,370,565,356
2017	ULTJ	347,000	1,026,231

2017	WIIM	29,473,484,420	54,491,308,212
2017	TSPC	538,603,804,385	744,090,262,873
2018	GGRM	2,897,496	10,479,242
2018	KAEF	166,978,040,978	577,762,327,511
2018	KINO	34,557,803,047	200,385,373,873
2018	PYFA	2,961,618,997	11,317,263,776
2018	SKBM	10,858,232,331	20,887,453,647
2018	SKLT	6,739,409,776	39,567,679,343
2018	ULTJ	291,992	949,018
2018	WIIM	18,067,051,524	70,730,637,719
2018	TSPC	526,447,491,388	727,700,178,905